



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : RSJD SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WARNO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN, REHABILITASI & KESEHATAN JIWA MASYARAKAT**
3. NHK : **221336**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.040.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1015 m2/176 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1540 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 265 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 78.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR`2002 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 250.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 100.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.118.350.000

**III. HUTANG** Rp. 33.988.000



## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.084.362.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.